
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program secara konsisten dan spesifik. Berdasarkan analisis strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yang akan diterjemahkan dengan program-program pembangunan. Prioritas pembangunan Aceh Tengah Tahun 2012-2017 adalah: 1) Syari'at Islam; 2) Tatakelola Pemerintahan; 3) Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi; 4) Pendidikan; 5) Kesehatan; 6) Perdamaian; 7) Penanggulangan Kemiskinan; 8) Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Pertanian dan Perkebunan; 9) Sosial, Budaya dan Pariwisata; dan 10) Lingkungan dan Kebencanaan.

Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMK yang akan dituangkan kedalam rencana strategis masing-masing satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK).Selanjutnya, penjelasan kebijakan umum dan program unggulan berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017 dijelaskan secara rinci pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB	
				AWAL		AKHIR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I SYARIAH ISLAM										
1	Peningkatan syiar dan pelaksanaan Syariat Islam	1	Program pelaksanaan Syariat Islam	Menurunnya pelanggaran terhadap syariat Islam	40	Persen	15	Persen	Wajib	Dinas Syariat Islam dan 14 Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah/Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dan Majelis Permusyawaratan Ulama, Baitul Mal.
		2	Program peningkatan sarana dan pra sarana ibadah	Meningkatnya pembinaan masjid dan menasah	295	Mesjid/Meunasah	295	Mesjid/Meunasah	Wajib	Dinas Syariat Islam/Sekretariat daerah bagian Kesra
		3	Program pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah	Meningkatnya sarana dan prasarana ibadah	75	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		4	Program peningkatan kualitas SDM Imam, Khatib, Bilal, Qari, Qariah dan penyuluh	Meningkatnya kualitas pelaksanaan syariat Islam	100	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Syariat Islam
		5	Program pembinaan Hukum adat dan hukum syariat	Meningkatnya pemahaman hukum adat dan hukum syariah	70	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Syariat Islam
		6	Program peningkatan kemakmuran masjid	Meningkatnya suasana keislaman	70	Persen	90	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Bagian Kesra
		7	Program optimalisasi peran dan fungsi Ulama	Meningkatnya suasana keagamaan ditengah masyarakat melalui peningkatan peran dan fungsi Ulama	25	Persen	75	Persen	Wajib	Majelis Permusyawaratan Ulama
		8	Program Pembinaan dan peningkatan sumber daya Ulama	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ulama	108	Orang	295	Orang	Wajib	Majelis Permusyawaratan Ulama
		9	Program peningkatan pengelolaan zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian.	Meningkatnya profesionalisme pengelolaan zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian	80	Persen	100	Persen	Wajib	Baitul Mal
		10	Program Peningkatan ZIS dan Pembinaan Kelembagaan.	Meningkatnya Pendapatan ZIS untuk PAD	60	Persen	90	Persen	Wajib	Baitul Mal
II TATA KELOLA PEMERINTAHAN										
1	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas database kependudukan	60,31	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS	Meningkatnya pelayanan pindah/purnah tugas aparatur	100	Persen	100	Persen	Wajib	BKPP
		3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekdakab. Umum, Humas dan Tapem

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB		
				AWAL		AKHIR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4	Program Pengelolaan Pelayanan perizinan Publik Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan perizinan kepada publik	0	Kecamatan	14	Kecamatan	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Tapem	
		5	Program pengembangan wilayah perbatasan	Meningkatnya tertib administrasi batas wilayah kabupaten dan kecamatan	7	Kasus	0	Kasus	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Tapem	
		6	Program Pemekaran wilayah Administrasi	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan	14	Kecamatan	19	Kecamatan	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Tapem	
		7	Program Pemberian penghargaan dan tanda jasa	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Umum	
		8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan legislatif	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat DPRK	
		9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan perizinan kepada publik	50	persen	100	Persen	Wajib	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		10	Program Pengelolaan Pelayanan perijinan Publik Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan perizinan kepada publik di kecamatan	0	Kecamatan	14	Kecamatan	Wajib	Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah	
	2 Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Program peningkatan kapasitas aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	Persen	100	Persen	Wajib	BKPP	
		2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pelayanan aparatur sesuai dengan SOP	0	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Organisasi	
				Meningkatnya profesionalisme pelayanan aparatur	70	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Organisasi	
			3	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkatnya profesionalisme pelayanan aparatur	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Organisasi
			4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	70	Persen	100	Persen	Wajib	BKPP
			5	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	Persen	100	Persen	Wajib	BKPP
		6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya kapasitas aparatur di bidang kearsipan	100	Persen	100	Persen	Wajib	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	3 Peningkatan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Tapem, Umum, dan Inspektorat	
		2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	65	persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Organisasi dan DPKKD	
		3	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas kinerja legislatif	70	persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat DPRK	
		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah		WTP		WTP	Wajib	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	
		5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah		WTP		WTP	Wajib	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	
	Meningkatnya pendapatan asli daerah			100	persen	100	Persen	Wajib	Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya informasi pembangunan daerah	100	persen	100	Persen	Wajib	BAPPEDA/BKB&PP/Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm.Pembangunan
	4 Peningkatan tertib administrasi kearsipan	1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Meningkatnya kualitas administrasi kearsipan	100	persen	100	Persen	Wajib	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		2 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan	100	persen	100	Persen	Wajib	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		3 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Meningkatnya kelestarian arsip daerah	100	persen	100	Persen	Wajib	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	5 Penegakan supremasi hukum	1 Program penataan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan perundang-undangan	100	persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian hukum
		2 Program pembinaan dan fasilitasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan	100	persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian hukum
		3 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya produk hukum yang disahkan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat DPRK
		4 Program Peningkatan sistem internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah	Meningkatnya advokasi hukum bagi aparaturnya dan masyarakat	100	persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian hukum
III INFRASTRUKTUR DASAR YANG TERINTEGRASI									
	1 Penyediaan infrastruktur daerah yang terintegrasi	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan sentra produksi	694,97	km	741,77	km	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya pelayanan aksesibilitas jalan dan jembatan di Kabupaten	40	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
			Panjang jalan kondisi baik	358,1	km	694,97	km	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
			Panjang jalan kondisi rusak ringan	44,43	km	-	km	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		Panjang jalan kondisi rusak berat	147,48	km	46,80	km	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum	
	3 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan yang rusak	5	dokumen	10	dokumen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum	
	4 Program tanggap darurat jalan dan jembatan	4 Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Terjaminnya aksesibilitas antar wilayah	100	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		5 Program pengembangan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas informasi dan database jalan dan jembatan	5	Dokumen	5	Dokumen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		6 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kebinamargaan	50	Persen	75	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		7 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Meningkatnya umur guna jalan dan kualitas lingkungan	40	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		9 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Tersedianya turap/talud/beronjong pada daerah rawan longsor	2,33	KM	7,33	KM	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Peningkatan produktivitas komoditi pertanian	1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
	3 Peningkatan pemanfaatan dan konservasi sumberdaya air	1 Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Meningkatnya ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat	45	Persen	65	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya air	4.020	Meter	5131	Meter	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum/Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan
			Tersedianya dokumen uji baku mutu air	1	dokumen	1	dokumen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
			Tersedianya infrastruktur penampung air	5	embung	10	embung	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
	4 Pengembangan perdesaan, wilayah strategis dan cepat tumbuh sesuai tata ruang	3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya akses air minum yang aman, cukup dan sehat bagi masyarakat	29	Persen	69	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		4 Program Pengendalian Banjir	Tersedianya system air limbah setempat yang memadai	10	Persen	35	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
			Tersedianya system air limbah skala komunitas/ kawasan/kota	10	Persen	50	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
			1 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh yang menjadi domain kesosialan dan ketenagakerjaan	50	Persen	80	Persen	Wajib
		2 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan	17	Unit	32	Unit	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
	3 Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya data dan informasi pemanfaatan wilayah sesuai dengan pola dan struktur ruang	0	Dokumen	5	Dokumen	Wajib	BAPPEDA/Dinas Pekerjaan Umum	
	4 Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya pemanfaatan wilayah sesuai dengan pola dan struktur ruang	2	Dokumen	6	Dokumen	Wajib	BAPPEDA/Dinas Pekerjaan Umum	
	5 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap pemanfaatan ruang	30	Persen	90	Persen	Wajib	BAPPEDA/Dinas Pekerjaan Umum	
	6 Program Kerjasama Pembangunan	6 Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya koordinasi antar penyelenggara pembangunan	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm.Pembangunan/ BAPPEDA
		7 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Meningkatnya koordinasi antar wilayah perbatasan dalam Kabupaten Aceh Tengah	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm. Pembangunan/ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
	5 Peningkatan kualitas perencanaan daerah	1 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan	100	Persen	100	Persen	Wajib	Bappeda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB		
				AWAL		AKHIR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	100	Persen	100	Persen	Wajib	Bappeda		
			Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	5	Dokumen	20	Dokumen	Wajib	Bappeda		
			Cakupan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan dokumen kebijakan dan perencanaan publik	25	Persen	50	Persen	Wajib	Bappeda		
				3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi daerah	50	Persen	75	Persen	Wajib	Bappeda
				4 Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial dan budaya daerah	50	Persen	75	Persen	Wajib	Bappeda
				5 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur daerah	50	Persen	75	Persen	Wajib	Bappeda
				6 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana	0	Dokumen	4	Dokumen	Wajib	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6 Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan		1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
			2 Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan	30	Persen	55	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan kelancaran arus barang dan jasa	30	Persen	55	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	60	Persen	95	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya keamanan berlalu lintas dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	40	Persen	75	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
7 Penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas umum		6 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelayakan kendaraan	30	Persen	75	Dokumen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
			1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya status kepemilikan lahan pemda	75	Persen	80	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Tata Pemerintahan	
				Menurunnya angka perselisihan kepemilikan lahan masyarakat	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Tata Pemerintahan	
			2 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Meningkatnya kualitas database pertanahan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Tata Pemerintahan	
3 Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Tersedianya areal pemakaman	6	Areal	16	Areal	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum, BLHK & P				

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8 Peningkatan akses informasi masyarakat terhadap pembangunan berbasis teknologi informasi	1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya minat masyarakat menggunakan media informasi secara online	10	Persen	45	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, BAPPEDA
		2 Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap ICT	1	Unit	1	Unit	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Humas
		3 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya kapasitas SDM (aparatur dan masyarakat) di bidang komunikasi informasi	25	Persen	45	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Humas/Sekretariat Daerah Kabupaten Bag.Tata Humas
		4 Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Meningkatnya informasi pembangunan kepada masyarakat	100	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Humas
		5 Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan	75	Persen	100	Persen	Wajib	BAPPEDA, dan Sekdakab. Bagian Adm. Pembangunan
	9 Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan	1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan pertambangan	75	Persen	100	Persen	Pilihan	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm.Perekonomian, Disperindagkop & ESDM
		2 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Menurunnya jumlah penambangan liar	0	Persen	40	Persen	Wajib	Disperindagkop & ESDM
		3 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber energi listrik	75	Persen	100	Persen	Wajib	Disperindagkop & ESDM
IV	PENDIDIKAN								
	1 Peningkatan akses pendidikan	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APK PAUD	30	Persen	40	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya akses pendidikan dasar	60	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
			APK SD/MI	114,01	indeks	115,05	indeks	Wajib	Dinas Pendidikan
			APK SMP/MTs	101,60	indeks	101,60	indeks	Wajib	Dinas Pendidikan
			APM SD/SDLB/ MI	96,99	indeks	100,00	indeks	Wajib	Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB	
				AWAL		AKHIR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			APM SMP	76,86	indeks	100,00	indeks	Wajib	Dinas Pendidikan	
			Angka Kelulusan SD/MI	100	persen	100,00	persen	Wajib	Dinas Pendidikan	
			Angka Kelulusan SMP/ SMPLB/MTs	99,95	persen	100,00	persen	Wajib	Dinas Pendidikan	
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,008	persen	0,003	persen	Wajib	Dinas Pendidikan	
			Angka Putus Sekolah SMP/ SMPLB/MTs	0,019	persen	0,003	persen	Wajib	Dinas Pendidikan	
		3	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya akses pendidikan menengah	70	Persen	100,00	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
				APK SMA/SMK/MA	92,06	Persen	100,00	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Meningkatnya Proses Pembelajaran di Dayah	60	Persen	80	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		5	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dayah	60	Persen	80	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		6	Program Pendidikan Dayah dan Pemberdayaan Santri	Meningkatnya SDM Santri	60	Persen	80	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		7	Program Pembinaan Manajemen Dayah	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Dayah	50	Persen	70	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		8	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	Terwujudnya Pengembangan Dayah	25	Persen	45	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		5	Program Pendidikan luar biasa	Meningkatnya akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus	51	Persen	81	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat baca masyarakat dan pelayanan perpustakaan	10	Persen	60	Persen	Wajib	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	Peningkatan kualitas pendidikan	1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	51	Persen	84	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya profesionalisme manajemen pelayanan pendidikan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Pendidikan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan/Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
V	KESEHATAN									
1	Peningkatan pelayanan kesehatan secara profesional	1	Program peningkatan sarana/ prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	85	Persen	100	Persen	Wajib	Rumah Sakit Umum Daerah
		2	Program peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD RSU	Meningkatnya kualitas pelayanan pelayanan pada BLUD RSU	75	Persen	100	Persen	Wajib	Rumah Sakit Umum Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Berkurangnya anggaran sharing dari pemerintah daerah	25	Persen	0	Persen	Wajib	Rumah Sakit Umum Daerah
	2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 Program pelayanan kesehatan penduduk Miskin	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin	75	Persen	85	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan/BKB & PP
		2 Program Obat dan Perbekalan	Meningkatnya ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan	80	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Menurunnya angka kesakitan masyarakat	80	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		4 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya jaminan penggunaan obat dan makanan berbahaya	25	Persen	75	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat	55	Persen	95	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya angka gizi buruk	25	Persen	0	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
			Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	0,7	Persen	02	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
			Cakupan MPASI untuk masyarakat miskin	64	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat	25	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya angka kematian akibat penyakit menular	10	Persen	0	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan sesuai SPM	90	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PUSKESMAS/PUSKESMAS Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1,12	Rasio	1,19	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunnya angka kematian balita	22	Rasio	18	Rasio	Wajib	Dinas Kesehatan
		12 Program Peningkatan Kesehatan Lansia	Meningkatnya usia harapan hidup	90	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Menurunnya angka kesakitan masyarakat akibat keracunan makanan	65	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
	14 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	25	Persen	20	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan	
	15 Program pembinaan dan pengembangan pendidikan kesehatan	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	85	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan	
VI	PERDAMAIAN								
	1 Peningkatan rasa aman terhadap masyarakat	1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan bagi masyarakat	50	Persen	75	Persen	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat/Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 Program Pemeliharaan kantribmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya penegakan supremasi hukum	50	Persen	75	Persen	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat/Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
		3 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	40	Persen	75	Persen	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		4 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya penanganan norma dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat	100	Persen	100	Persen	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	2 Peningkatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	1 Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	80	Persen	95	Persen	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan antar pemangku kepentingan	0	Koordinasi	20	Koordinasi	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		3 Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	60	Persen	85	Persen	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
VII PENANGGULANGAN KEMISKINAN									
	Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka menurunkan angka kemiskinan	1 Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya ketersediaan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	295	Unit	927	Unit	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat perumahan masyarakat miskin	1	Dokumen	5	Dokumen	Wajib	BAPPEDA/Dinas Pekerjaan Umum/Badan Pemberdayaan
1	Penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin	3 Program pemberdayaan komunitas perumahan	Meningkatnya sertifikasi kepemilikan perumahan	1	Fasilitasi	5	Fasilitasi	Wajib	Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum
		1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	20	Persen	80	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2 Program Peningkatan kesempatan kerja	Angka pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan	20	Persen	45	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya angka penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	100	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4 Program Pembinaan kreativitas, inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya ekonomi kreatif masyarakat	0	Persen	100	Persen	Pilihan	BKB & PA, BPM & PK dan 14 Kecamatan Lingkup Pemerintah Aceh Tengah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 Peningkatan pengelolaan lembaga koperasi dan UMKM secara profesional	1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya profesionalisme koperasi dan UKM	10	Persen	50	Persen	Wajib	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi kampung	20	Persen	85	Persen	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
	4 Peningkatan profesionalisme lembaga kampung dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya profesionalisme lembaga desa	50	Persen	95	Persen	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
		2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	10	Persen	50	Persen	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
		3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur kampung	50	Persen	90	Persen	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
5 Peningkatan kesejahteraan masyarakat	1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	1	Dokumen	6	Dokumen	Pilihan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2 Program Transmigrasi Lokal	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal	258	KK	600	KK	Pilihan	Dinsosnakertrans, Disnakkam, Distan TP
VIII	KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN								
	1 Peningkatan minat investor untuk menanam modal dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan peningkatan PAD	1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Aceh Tengah	4	Event	20	Event	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm.Perekonomian/ BAPPEDA
	2 Peningkatan nilai tambah pertanian	2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian	961	kelompok	1.151	kelompok	Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya pendapatan petani yang dibantu	6.075	Orang	6.475	Orang	Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Menurunnya daerah rawan pangan	70	Persen	95	Persen	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan/Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	46.277	Ton	59052,00	Ton	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan/Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Peningkatan Infrastruktur Pertanian			36	Km	55,8	Km	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan/Dinas Perkebunan dan Kehutanan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rehabilitasi Kebun Kopi Rakyat	5.836	Ha	836	Ha	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan/Dinas Perkebunan dan Kehutanan
			Perluasan/Pembukaan Lahan Kebun Rakyat	10.138	Ha	13.658	Ha	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan/Dinas Perkebunan dan Kehutanan
		3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan, peternakan/perikanan	10	Komoditas	10	Komoditas	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan/Dinas Perkebunan dan Kehutanan
		4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	20	Persen	45	Persen	Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			Ketersediaan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	39	Unit	41,00	Unit	Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan penelitian teknologi pertanian tepat guna	2	Ha	19	Ha	Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			Pengendalian serangan hama penyakit tanaman kopi	12.693	Ha	4.693	Ha	Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			Jumlah unit pengolahan pasca panen kopi (pulper)	86	Unit	286	Unit	Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			Jumlah unit pengolahan pasca panen tebu	28	Unit	36	Unit	Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			Persentase peningkatan produktifitas kopi	1	Ton/Ha/Thn	1	Ton/Ha/Thn	Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			Ketersediaan penelitian pertanian					Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	60	Persen	85	Persen	Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		6	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan	25	Persen	70	Persen	Pilihan	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan/Dinas Peternakan dan Perikanan
		7	Program peningkatan produksi hasil peternakan	30	Persen	70	Persen	Pilihan	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Peningkatan populasi ternak						
			- Ternak besar	21.893	ekor	32.843	ekor	ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB		
				AWAL		AKHIR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			- Ternak kecil	12.985	ekor	15.615	ekor	ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan		
			- Ternak unggas	319.935	ekor	319.935	ekor	ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan		
			Peningkatan areal/kawasan peternakan	651	Ha	1.011	Ha	ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan		
		8	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan bagi hasil untuk daerah	30	Persen	80	Persen	Pilihan	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan	1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya angka penyakit ternak	100	Persen	100	Persen	Pilihan	Dinas Peternakan dan Perikanan
		2	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan lahan non produktif	10	Persen	50	Persen	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Disbunhut	
		3	Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian	Meningkatnya ketersediaan sarana pendukung pertanian	2	Unit	8	Unit	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	
	4	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dan peternakan	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan danau Lut Tawar	6,5	Ha	31,5	Ha	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan
		2	Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	587	Unit	675,05	Unit	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		3	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatnya Kawasan Budidaya Air Tawar	1	Kawasan	18	Kawasan	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		4	Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya akses pasar produksi perikanan	25	Persen	35	Persen	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan	
				Peningkatan Produksi Benih	200.000	ekor	490.0000	ekor	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan	
				Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produksi perikanan	28	unit	120	unit	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		5	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatnya Kawasan Budidaya Air Tawar	1	kawasan	20	kawasan	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan	
	5	Peningkatan peran pemerintah dalam pengendalian pasar	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Menurunnya angka kelangkaan BBM dan pupuk bersubsidi	14	Kecamatan	14	Kecamatan	Pilihan	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm. Perekonomian/Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Tersedianya resi gudang bagi petani	1	Unit	1	Unit	Pilihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3	Program Penataan Struktur Industri	Tersedianya kawasan industri sesuai dengan keunggulan komparatif daerah	14	Kecamatan	14	Kecamatan	Pilihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar	Meningkatnya fasilitas pemasaran produk	9	Pasar	17	Pasar	Pilihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri	1 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Meningkatnya promosi produk unggulan daerah	60	Persen	72	Persen	Pilihan	Sekdakab. Bagian Ekonomi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri	65	Persen	85	Persen	Pilihan	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm. Perekonomian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD, Koperasi dan UMKM	1 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkatnya fasilitasi bagi pedagang kaki lima/ asongan untuk memperoleh lapangan usaha	2	Fasilitasi	6	Fasilitasi	Pilihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	50	Persen	80	Persen	Pilihan	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm. Perekonomian/Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah	14	Kecamatan	14	Kecamatan	Pilihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
IX	SOSIAL BUDAYA DAN PARIWISATA								
1	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak	10	Persen	50	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan anak serta terlaksananya perencanaan dan anggaran yang responsif gender	20	Persen	70	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan efektifitas perlindungan bagi perempuan dan anak	100	Persen	100	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keluarga sehat sejahtera	1 Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Kualitas dan cakupan Pelayanan Keluarga Berencana	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 Program Pelayanan Kontrasepsi	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya partisipasi akseptor KB/KR	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan Ibu dan anak	908	Orang	908	Orang	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Meningkatnya akses informasi terhadap pertumbuhan anak	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendamping keluarga sejahtera	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Meningkatnya profesionalisme pelayanan posyandu	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		9 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Meningkatnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi	24	Kelompok	24	Kelompok	Wajib	BKB dan PP
3	Peningkatan penanggulangan permasalahan sosial dalam masyarakat	1 Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Menurunnya tingkat penyalahgunaan narkoba dan penyakit masalah sosial	24	Kelompok	24	Kelompok	Wajib	BKB dan PP
		2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya taraf hidup masyarakat miskin, adat terpencil dan penyandang masalah sosial	60	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Setdakab. Bag. Ekonomi
		3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya layanan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dan penanganan masalah strategis yang menyangkut rencana tanggap darurat/kejadian luar biasa	50	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4 Program Pembinaan Anak Terlantar	Mengurangi jumlah anak terlantar	10	Persen	50	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya pemberdayaan terhadap penyandang cacat dan trauma	10	Persen	50	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		6 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Meningkatnya pelayanan terhadap lansia dan anak yatim piatu	14	Panti	20	Panti	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		7 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya)	Meningkatnya keterampilan berusaha eks penyandang penyakit sosial	50	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	50	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4 Pengembangan dan pelestarian nilai, kekayaan dan keragaman budaya	1 Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya	1	event budaya/ tahun	5	event budaya/ tahun	Wajib	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan budaya	1	Buku	5	Buku	Wajib	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya	1	Event Gebyar Seni dan Budaya	6	Event Gebyar Seni dan Budaya	Wajib	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	5 Peningkatan minat masyarakat terhadap olah raga dan kepariwisataan	1 Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah raga	Meningkatnya minat masyarakat terhadap olah raga	3	Kegiatan	20	Kegiatan	Wajib	Disbudparpora
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya prestasi atlet daerah pada event daerah dan nasional	60	Persen	75	Persen	Wajib	Disbudparpora
		3 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan	60	Persen	90	Persen	Wajib	Disbudparpora
		4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya penyebaran informasi wisata tingkat nasional dan internasional	50	Persen	80	Persen	Pilihan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri	50	Persen	80	Persen	Pilihan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		6 Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya koordinasi antar pelaku kepariwisataan	1	Koordinasi	6	Koordinasi	Pilihan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
X	LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN								
	1 Peningkatan kualitas lingkungan secara lestari	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kesehatan lingkungan	10,4	Persen	30	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
		2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan	45	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
		3 Program Perlindungan konservasi dan sumber daya alam	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam	30	Persen	10	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
		4 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam	45	Persen	25	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan/Dinas perkebunan Kehutanan dan BPBD
		5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya akses informasi terhadap potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	100	Persen	100	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan/BPBD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB		
				AWAL		AKHIR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan/BAPPEDA/ Dinas Pekerjaan Umum	
		7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Menurunnya luas lahan kritis	40	Ha	600	Ha	Pilihan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
		8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Menurunnya praktek illegal logging	30	Persen	10	Persen	Pilihan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
		9	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Meningkatnya pengamanan kawasan hutan	6	KM	52	KM	Pilihan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
		10	Program Peningkatan pengendalian polusi	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	45	Persen	20	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	
	2	Peningkatan nilai tambah sumber daya hutan, ekowisata dan jasa lingkungan	1	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Meningkatnya Pendapata Asli Daerah melalui ekowisata dan jasa lingkungan	0	Kegiatan	4	Kegiatan	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
			2	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sumber daya hutan	10	Persen	50	Persen	Pilihan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			3	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan industri hasil hutan	30	Persen	80	Persen	Pilihan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	3	Peningkatan upaya penanggulangan bencana	1	Program pengendalian kebakaran hutan	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan	45	Persen	25	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
			2	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pelayanan tanggap darurat kebencanaan	100	Persen	100	Persen	Wajib	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3			Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Rehabilitasi rumah korban bencana alam	100	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum	
4			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

